

**PENERAPAN SSK (STRATEGI SANITASI KOTA)
DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
(Studi pada Kota Blitar)**

Kiky Della Citrawuni, Suryadi, Imam Hanafi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Email: angelicacullen@rocketmail.com

Abstract: *Based on the results of the research indicate that in the application of the SSK (City Sanitation Strategy) in the perspective of the construction of environmentally optimal yet. Internal factors selected back into human resources and infrastructure. While the eksternalnya factor is the coordination and communication with the community. Thus the advice given is the transparency of the relationship between institutions and the community need to be improved so that the anticipate of any misunderstanding. The community also should be given more recognition to arise awareness within the community about the importance of safe guarding the environment. The Government should also limit the continuous development. The construction has been done should provide land free to open green space as one way to balance between development and the environment. The Fund is also a factor in the problem so that careful planning should also be done to avoid the process of stopping the project so that the results be insufficient.*

Keywords: *city sanitation strategy, continous development, development and the environment.*

Abstrak: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan belum optimal. Faktor internal dipilih kembali menjadi sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sedangkan faktor eksternalnya adalah koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian saran yang diberikan adalah transparansi hubungan antara instansi dan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga mengantisipasi adanya kesalah pahaman. Masyarakat pun juga harus diberikan pengenalan yang lebih agar timbul kesadaran dalam diri masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah juga harus membatasi pembangunan yang terus menerus. Pembangunan yang telah dilakukan harus memberikan lahan bebas untuk ruang terbuka hijau sebagai salah satu cara menyeimbangkan antara pembangunan dan lingkungan. Faktor dana juga menjadi masalah sehingga perencanaan yang matang juga harus dilakukan untuk menghindari proses berhentinya proyek sehingga hasil menjadi kurang maksimal.

Kata kunci: **Strategi Sanitasi Kota, Pembangunan Terus Menerus, Pembangunan dan Lingkungan.**

Pendahuluan

Pada saat ini banyak perkotaan yang berlomba-lomba dalam rangka melaksanakan pembangunan, pembangunan tersebut dilakukan tanpa memikirkan keseimbangan lingkungan lahan yang ditempati. Hal ini menyebabkan tingkat kesadaran pelaku pembangunan dalam menjaga pembangunan dengan keseimbangan lingkungan menjadi minim dan menyebabkan kelestarian lingkungan menjadi tidak terjaga. Contoh dari pembangunan yang besar-besaran ini mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan secara permanen seperti banjir, longsor dan penumpukan sampah yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir ini. Pelaku pembangunan yang tidak terlalu peduli ini menjadi semakin

besar tingkat kerusakan lingkungan. Dijelaskan pada “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal (1) Kesehatan suatu keadaan dimana lahir batin dalam kondisi tidak tertekan. Menjaga kesehatan lingkungan adalah salah satu awal mula manusia untuk menjaga dan merawat dirinya sendiri agar terhindar dari berbagai penyakit, sehingga sesuai dengan ajaran islam yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari Iman maka hal awal yang harus diterapkan terlebih dahulu adalah menjaga kesehatan diri sendiri terlebih dahulu.

Indonesia adalah negara yang mengutamakan penyeimbangan kesehatan dan pembangunan. Pemerintahnya banyak

mencetuskan program-program yang berhubungan erat dengan menjaga kesehatan dan menjaga keseimbangan lingkungan disekitar yang ditempati. Salah satu program pemerintah adalah *Indonesia Sanitation Sector Development Program* (ISSDP), yaitu adalah suatu program yang terencana, terintegrasi dari pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dalam bidang sanitasi yang pelaksanaannya telah direncanakan secara terintegrasi agar dapat berjalan sesuai rencana sehingga sanitasi bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. WHO mendefinisikan bahwa sanitasi adalah tindakan sengaja yang bertujuan agar masyarakat tidak kontak langsung dengan kotoran dan zat kimia berbahaya. Sebagai kelanjutan dalam program ini terdapat PPSP yaitu program percepatan pembangunan sanitasi permukiman, dan salah satu penerapan pelaksanaannya adalah dalam SSK (Strategi Sanitasi Kota). Strategi Sanitasi Kota (SSK) adalah suatu dokumen berisi tentang rencana dan tata cara pelaksanaan Sanitasi yang baik sehingga pada pelaksanaan SSK dapat berjalan sesuai rencana dengan apa yang diharapkan.

Tujuan SSK adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di kota Blitar yang dapat mengakibatkan pola sanitasi yang buruk. Selain itu untuk menggalakkan kegiatan Bebas BAB (Buang air besar) sembarangan, dan untuk mewujudkan Mdggoals dan Indonesia sehat 2015. Dari pengalaman yang ada maka pada tahun 2007 para pejabat penting kota mengadakan suatu deklarasi yang diberi nama Deklarasi kota Blitar. Dalam Deklarasi ini terdapat cara-cara penting yang efektif didalam mengatasi pengelolaan sampah, limbah cair, banjir, dan kelangkaan air bersih, kemudian dituangkan dalam Buku Putih Sanitasi 2007. Hal ini juga menandakan bahwa pemerintah Kota Blitar berpartisipasi dalamprogram *Indonesia Sanitation Sector Development Program* (ISSDP) tersebut.

Kota Blitar merupakan salah satu kota yang menerapkan SSK dan dipergunakan sebagai alat manajemen untuk membuat transparansi perencanaan dan pelaksanaan sanitasi secara keseluruhan agar dapat mencapai tujuan sanitasi yang diharapkan.. Berawal dari banyak nya lahan pembangunan dibeberapa Kecamatan di Kota Blitar seperti di Kecamatan Sukorejo dan Pakunden yang di wilayahnya terdapat pembangunan Pasar terbesar di Kota Blitar yakni Pasar Legi dan Pasar Templek, kemudian Kecamatan Sananwetan yang wilayahnya terdapat pembangunan perumahan yang mengambil ruang terbuka hijau menjadi kawasan komplek perumahan. Ketiga Kecamatan diatas adalah tiga

kecamatan terbesar yang terletak dipusat kota Blitar yang merupakan kawasan padat penduduk dan berlokasi di pinggir rel kereta api. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kota Blitar didalam menjaga lingkungan yang ia tempati mengakibatkan banyak dampak negatif pada lingkungan. Perilaku mereka berawal dari cara mereka yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya.

Pada tahap awal pelaksanaan SSK ini berjalan dengan baik karena mendapatkan dukungan penuh dari elemen terkait SSK (Strategi Sanitasi Kota) seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, PDAM, Dinas Kesehatan hingga Pemerintahan Kota Blitar menerapkan SSK ini dengan baik karena mereka bekerja sama satu sama lain, sehingga akhirnya SSK ini berlanjut pada periode kedua. Namun setelah terjadi pergantian walikota, pemerintah kota yang mulanya sepenuhnya mendukung menjadi terkesan tidak terlalu mendukung, karena pemerintah kota Blitar saat ini lebih berkonsentrasi pada penerapan Ekonomi kreatif. Saat ini pemerintah kota Blitar sedang gencar melaksanakan kebijakan Ekonomi kreatif . Hal ini menyebabkan lahirnya beberapa faktor penghambat penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota).

Tingkat kemiskinan yang tinggi juga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan hal ini menyebabkan lingkungan masyarakat yang ada dikota Blitar menjadi kurang nyaman untuk ditempati karena kumuh, sehingga tempat yang kurang layak tersebut mengakibatkan banyak lahirnya penyakit.. Kota Blitar sendiri hanya memiliki lahan yang kecil dan pada saat ini kota Blitar termasuk wilayah yang sangat padat penduduknya, tidak seperti dulu. Semenjak terjadinya pembangunan didaerah lingkungan kota Blitar , warga yang berdomisili ditiga kecamatan tersebut menjadi kesulitan air bersih, di karenakan berkurangnya daerah lahan resapan air, serta padatnya penduduk mengakibatkan jumlah air bersih kurang memadai. Untuk menunjang program itu maka pejabat Kota Blitar membuat rencana kelompok kerja sanitasi dengan keluarnya perintah dalam surat ISSDP dengan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/5/HK/442.010.02/2006 yang dikeluarkan pada 2 Februari 2006 yang kemudian diperbarui dengan SK Walikota Blitar Nomor :188/5/HK/422.010.02/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2007. Para pejabat kota Blitar memahami bahwa penting dalam menjaga lingkungan yang ditempati sehingga lingkungan dapat memberikan dampak positif bagi

masyarakat yang menempati. Mulai dari pengelolaan limbah, air, dan sampah sangatlah penting dilakukan untuk mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemangku kepentingan dikota Blitar akhirnya sepakat dengan pemerintah pusat untuk ikut dalam program ISSDP (Indonesia Sanitation Sector Development) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan sanitasi yang terencana dan di terapkan sebaik-baiknya.

Strategi sanitasi kota ada karena pembangunan yang ada hanya mementingkan nilai ekonomis tidak memikirkan tentang pentingnya menjaga lingkungan yang ditempati, sehingga mengakibatkan pols hidup yang tidak sehat karena tidak memperhatikan pentingnya mengelola lingkungan yang ditempati. Subtansi dari SSK sendiri mencakup limbah, sampah, drainase, dan perilaku bersih dan sehat. Strategi sanitasi kota merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan dasar pelaksanaan sanitasi agar lebih terarah dalam pengerjaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mereka memerlukan penyusunan Kota (SSK) Blitar tahun 2008 – 2012. Pada hal tujuan yang lebih luas diharapkan SSK bisa memenuhi capaian target tujuan pertamanya yaitu MDgoals 2015.

Sanitasi memiliki hubungan yang erat dengan lingkup kemiskinan. Apabila sanitasi tidak berjalan dengan baik maka akan berhubungan dengan tingginya tingkat kematian bayi dikawasan pemukiman penduduk miskin dikawasan Kota Blitar. Apabila pelaksanaan program sanitasi dapat dilaksanakan dengan baik dapat mendukung kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri. Mulai dari pengelolaan limbah, air, sampah dan drainase lingkungan. Tahap awal perencanaan program ini adalah dimulai pada tahap perencanaan dari SK walikota Pada tahun 2006-2007. SSK di kota Blitar telah dilaksanakan selama dua periode, yaitu SSK 2007-2012 dan SSK 2013-2017.

Tinjauan Pustaka

1. Strategi

Strategi menurut Kusdi (2009, h.87) adalah sebuah ide pokok pemikiran yang berupa tahap perencanaan yang ada didalam suatu pembuatan program atau kebijakan yang didalam tahap penyusunannya dipikirkan secara seksama agar tujuan dan misi organisasi berjalan dengan baik. Bisa dikatakan sebagai suatu alat manajemen agar kegiatan bisa lebih berjalan sesuai dengan rencana.

Dengan adanya strategi diharapkan mempermudah suatu rencana dalam menerapkan pelaksanaannya. Strategi juga diharapkan dapat lebih memberikan pedoman yang signifikan agar

pelaksanaan bisa sesuai dengan harapan. Dengan menggunakan strategi maka pelaksanaan akan lebih mudah dan berjalan sesuai rencana.

2. Sanitasi

Menurut Silalahi (2003, h.23) menjelaskan bahwa Sanitasi yang berwawasan lingkungan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan cara memanfaatkan hal yang tidak berguna menjadi sesuatu yang memiliki daya guna dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Kegiatan banyak dilakukan oleh Negara maju atau berkembang untuk mewujudkan Millineum Development Goals. Sistem seperti ini selain menghemat biaya juga bisa memanfaatkan bahan yang tidak berguna menjadi berguna, bahan yang tidak bernilai menjadi bernilai ekonomis.

3. Teori Pelayanan Publik

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 menjelaskan suatu rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara yang memenuhi kualifikasi dalam undang-undang. Pelayanannya dapat berbentuk barang, jasa atau pelayanan administratif. Layanan ini disediakan oleh birokrasi sebagai aktor pelayanan publik.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip-prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan antara lain dalam Syamsuharya (2008, h.33) dalam setiap pembangunan harus mendasarkan pada beberapa prinsip, seperti prinsip keadilan antar generasi, yaitu tiap manusia memiliki hak untuk tinggal ditempat yang layak, dimana setiap manusia memiliki hak untuk bertempat tinggal dibumi dalam kondisi yang layak antar sesama generasi. Yang kedua yaitu prinsip keadilan dalam satu generasi yaitu tiap generasi yang tinggal satu lingkungan harus bisa bekerjasama menjaga lingkungan yang ia tinggali. Yang ketiga yaitu prinsip pencegahan dini yaitu mencegah kerusakan lingkungan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

Yang ke empat adalah prinsip perlindungan keragaman hayati yaitu prinsip yang digunakan apabila prinsip keadilan sesama generasi tidak berjalan maka prinsip ini digunakan sebagai tindak pencegahan. Yang ke lima yaitu prinsip internalisasi biaya lingkungan . Maksudnya apabila lingkungan dirusak oleh suatu kegiatan ekonomi, maka pelaku ekonomi harus menanggung biaya perbaikan dan pemulihan lingkungan tersebut.

5. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Menurut Mukono (2005, h.21) AMDAL adalah suatu kajian yang bertujuan untuk mengkaji suatu usaha atau aktivitas yang

berkaitan dengan lingkungan hidup. Tujuannya agar dapat diantisipasi dampak yang terjadi akibat kegiatan tersebut sehingga diperlukan untuk keselamatan lingkungan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah deskriptif pendekatan kualitatif dimana penelitian dilakukan dengan cara melihat keadaan yang ada dilapangan peristiwa apa yang terjadi. Peneliti menetapkan lokasi penelitian yang dipilih yakni Kota Blitar dan situs penelitian yang dipilih untuk memperoleh data yang akurat dan relevan yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup di Kota Blitar dan Kelurahan Tanjungsari sebagai daerah contoh salah satu penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) . Pada penelitian ini terdapat empat fokus yang dipilih oleh peneliti yakni Tahapan pelaksanaan SSK (Strategi Sanitasi Kota), Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) dalam menyeimbangkan pembangunan, Faktor pendukung dan penghambat SSK. Jenis data penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yakni data sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh di instansi atau catatan-catatan lapangan sebagai pendukung.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, melihat tempat kejadian atau observasi dan mengambil dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis data model interaksi dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014, h.14) yang didalamnya mencakup teknik cara mengumpulkan data, kondensasi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Tahapan Pelaksanaan SSK (Strategi Sanitasi Kota)

Hal pertama yang perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan SSK yaitu dinas terkait merencanakan dana dan pelaksanaan, kemudian mengadakan sosialisasi ke daerah yang dianggap membutuhkan, setelah itu menyiapkan tenaga pekerja dan membagi tugas sesuai dengan yang telah ditentukan. Setelah pelaksanaan berjalan tentunya dinas tetap memberikan pengawasan dan evaluasi guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) Dalam Menyeimbangkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Dalam pelaksanaan SSK, dinas terkait tetap memperhatikan lingkungan agar pembangunan lingkungan yang mereka kerjakan itu member dampak yang baik untuk lingkungan. Pada sektor pembangunan

sampah mereka membangun TPS dan TPA dikelurahan padat penduduk yang membutuhkan, serta menyiapkan tenaga sapu jalanan. Untuk limbah mereka membangun di area dekat sungai agar tetap terjaga lingkungannya. Untuk Drainase dibangun diarea padat penduduk yang memerlukan saluran air agar lingkungannya terbebas dari banjir.

3. Faktor Pendukung SSK (Strategi Sanitasi Kota)

Dalam pelaksanaannya faktor yang paling mendukung dalam SSK adalah dana, karena dana adalah suatu hal yang utama dalam suatu proyek. Kemudian sumber daya manusia nya sebagai penggerak organisasi yaitu pegawai yang saling bekerja sama. Selain itu masyarakat sebagai sasaran utama juga ikut serta mendukung kegiatan ini, sehingga dinas dan masyarakat bekerja sama menciptakan lingkungan yang bersih dan aman untuk ditinggali.

4. Faktor Penghambat SSK (Strategi Sanitasi Kota)

SSK adalah suatu bidang yang baik dimana mengajak masyarakatnya untuk menjaga lingkungan. Pemerintah haruslah ikut mendukung sepenuhnya bukan hanya dinas-dinas terkait saja. dukungan yang penting dari pemerintah. Dukungan pemerintah yang penting dapat membuat pembangunan besar-besaran yang tanpa memikirkan lingkungan di sekitarnya juga dapat diantisipasi. Tidak hanya itu komunikasi yang berjalan tidak baik mengakibatkan salah pengertian antara satu dan yang lainnya sehingga dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan satu sama lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) Blitar dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kelurahan Tanjungsari sebagai salah satu contoh wilayah yang termasuk dalam penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) belum optimal.

1. Faktor penghambat dari segi eksternal pada penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) Blitar dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan adalah:

a. Koordinasi dan Komunikasi dengan Masyarakat

Koordinasi dan Komunikasi dengan Masyarakat belum berjalan dengan baik sehingga

menimbulkan kesalahan pahaman. Dari kurangnya komunikasi ini menyebabkan terjadinya saling menyalahkan antara instansi dengan masyarakat. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat ini membuat masyarakat sebagai kaum awam menjadi tidak paham dengan bagaimana semestinya mengelola dan memelihara pembangunan pemerintah dengan baik dan benar.

2. Faktor penghambat dari segi eksternal penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan adalah:

a. Sumber daya manusia yang belum memadai dan jumlahnya belum stabil, padahal manusia adalah penggerak utama organisasi sehingga

mengakibatkan bekerja seadanya dan semampunya sehingga kegiatan belum bisa maksimal.

b. Sarana dan prsarana nya yang belum mencukupi. Dana sebagai sarana kadang kala dirasa kurang sehingga instansi terkesan menunggu dana tercukupi baru bertindak sehingga menyebabkan tidak sesuai jadwal perencanaan. Dalam hal prasarana dikarenakan kurangnya lahan yang tidak bisa disediakan guna mendukung keseimbangan lingkungan karena sudah terlanjur terkena pembangunan besar-besaran dan baru sadar ketika lingkungan sudah membawa dampak buruk.

Daftar Pustaka

- Bethan, Syamsuharya.(2008) **Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional (Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi)**. Bandung, PT Alumni.
- Kusdi (2009) **Teori Organisasi dan Administrasi**. Jakarta, Salemba Humanika
- Miles, Huberman, dan Saldana.(2013) **Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook**. Arizona. Arizona State University.
- Mukono, Hj.(2005) **Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development)**. Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1 Hal. 21
- Silalahi, Daud (2003) **Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia**.Bandung, P.T Alumnit.
- Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/5/HK/442.010.02/2006 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja ISSDP**. Blitar, Pemerintah Kota Blitar.
- Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor :188/5/HK/422.010.02/2007 Tentang Penyeimbangan Pembangunan dengan Lingkungan Hidup**. Blitar, Pemerintah Kota Blitar.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2009 **Tentang Kesehatan**. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri.
- Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 **Tentang Pelayanan Publik**. Jakarta, Kementerian Pemberdayaan.